

TAHUN
2024



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT BPR NTB PERSERODA

Jl. Adi Sucipto-Ampenan-Kota Mataram-NTB

Telp : (0370) –641875

www.bprntb.co.id Email :office@bprntb.co.id

PENDAHULUAN

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Berdasarkan SE OJK Nomor 16/SEOJK.03/2024, Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola adalah merupakan satu kesatuan data dan/atau informasi yang disampaikan secara daring melalui kanal Laporan Tahunan yang antara lain memuat ringkasan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR, pengungkapan penerapan tata kelola, kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, jumlah penyimpangan intern serta jumlah permasalahan hukum. Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

1. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assesment*) Atas Penerapan Tata Kelola BPR NTB yang berisi peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) dan penjelasan atas peringkat komposit hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*).

Alamat	:	Jln. Adi Sucipto – Kel. Ampenan Utara – Kec. Ampenan – Kota Mataram - NTB
Nomor Telepon	:	(0370) 641875
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (<i>transparency</i>), akuntabilitas (<i>accountability</i>), pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), independensi (<i>independency</i>), dan kewajaran (<i>fairness</i>) dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen

		dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Struktur Tata Kelola PT BPR NTB PERSERODA telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Berdasarkan Laporan publikasi PT BPR NTB PERSERODA posisi 31-12-2024 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.1.088.232.650.912 , sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.258.264.078.622 . Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR NTB dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT BPR NTB PERSERODA selanjutnya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	:	Peringkat 3 (cukup baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	:	<i>Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.</i>

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Susunan Anggota Direksi PT BPR NTB PERSERODA tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Ketut Sudharmana, S.P
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama secara umum tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan <i>Job Description</i> , antara lain :

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	1. Bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR NTB untuk kepentingan BPR NTB sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS; 2. Wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; 3. Menerapkan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi; 4. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau otoritas lainnya; 5. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR NTB; 7. Menyelenggarakan RUPS tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8. Wajib mengelola BPR NTB sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR NTB dan peraturan perundang-undangan; 9. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPR NTB mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota deteksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPR NTB dan/atau peraturan perundang-undangan; 10. Memimpin, mengarahkan, mengkoordinir dan mengevaluasi seluruh unit kerja BPR NTB untuk dapat menciptakan efektivitas, produktivitas yang tinggi, pertumbuhan usaha yang sehat, profitabilitas yang optimal dan tercapainya target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam RBB; 11. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR NTB terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK; dan 12. Memantau pertumbuhan dan perkembangan BPR NTB dan mencari alternatif solusi jika terjadi kendala dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tersebut di atas.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
2.	Nama : H. Usman, S.H., M.H
	Jabatan : Direktur Operasional
	Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional secara umum tercantum dalam Pedoman tata Kelola Perusahaan dan <i>Job Description</i>, antara lain : 1) Wajib mengelola BPR NTB sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 2) Memimpin dan mengarahkan kebijakan SDM di bawah koordinasi bidang Operasional, termasuk mengusulkan rekrutmen, promosi, mutasi/rotasi, pembinaan dan pelatihan; 3) Merencanakan, mengelola dan mengembangkan Akuntansi, Teknologi Informasi, Logistik, Pengadaan Barang Jasa dan SDM untuk kelancaran operasional dan memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku); 4) Pengendalian Anggaran dan Biaya BPR NTB sehingga seluruh biaya termonitor dengan baik dan efisien serta tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan; 5) Memastikan data laporan yang wajib disampaikan kepada OJK dan pihak eksternal lainnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengupayakan penyampaian laporan tersebut tepat waktu; 6) Memastikan kewajiban kepada Pihak ketiga seperti Pajak, BPJS, OJK, Premi Asuransi dan lain-lain telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu; 7) Penanggung jawab pada kebijakan dan prosedur operasional BPR NTB meliputi Akuntansi dan pelaporan, Teknologi Informatika, Logistik, Pengadaan Barang Jasa dan SDM; 8) Bertanggung jawab atas seluruh prosedur serta kelengkapan sistem dan pengamanan terhadap operasional BPR NTB; 9) Bertanggung jawab atas segala laporan yang berkaitan dengan bidang operasional dan menindaklanjuti hasil temuan audit yang berkaitan dengan bidang tugasnya; 10) Bertanggung jawab atas pengangkatan, penetapan jabatan, perhitungan tarif gaji/upah dan pembayarannya, penetapan kesejahteraan pegawai, promosi dan penurunan pangkat, mutasi pegawai, dan pemberhentian seluruh pegawai; 11) Memutuskan pengadaan barang dan jasa perusahaan; dan 12) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern BPR

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	NTB, hasil pengawasan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
3.	Nama : Hj. Denda Sucihartiani, S.E
	Jabatan : Direktur Bisnis
	Tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis secara umum tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan <i>Job Description</i>, antara lain : 1) Wajib mengelola BPR NTB sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 2) Mengarahkan, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan BPR NTB di Bidang Kredit, Dana dan Literasi; 3) Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengevaluasi pengelolaan bisnis di Bidang Kredit, Dana dan Literasi dengan mengoptimalkan kinerja seluruh SDM BPR NTB untuk tercapainya efektivitas kerja, produktivitas yang tinggi, pertumbuhan dana dan kredit yang sehat ,profitabilitas yang optimal serta target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank; 4) Membuat, mengevaluasi serta mensosialisasikan kebijakan dan strategi bisnis BPR NTB bidang dana, kredit dan <i>treasury</i> serta menjalin kerjasama dengan para <i>stakeholder</i> dalam upaya pengembangan bisnis BPR NTB; 5) Memastikan kegiatan Kredit, Dana dan Literasi pada seluruh unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya telah berpedoman pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan bank dan ketentuan ekstern lainnya yang berlaku; 6) Memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasi pengembangan serta penawaran produk-produk Kredit, Dana dan Literasi yang terbaik dan meningkatkan <i>Service excellent</i>; 7) Mengatur dan mengelola likuiditas dan memastikan BPR NTB dalam kondisi likuid di mana dana selalu tersedia untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga, memenuhi kebutuhan operasional bank termasuk pencairan kredit dan pengeluaran biaya operasional; 8) Memantau pengelolaan, perkembangan dan pertumbuhan kredit dan Kolektibilitas kredit Bank untuk tercapainya NPL dalam batas wajar; 9) Menyusun RBB bidang dana, kredit termasuk penanganan kredit bermasalah dan <i>treasury</i> serta mengevaluasi realisasi pencapaiannya setiap saat; dan 10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern, hasil

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	pengawasan Komisaris, OJK, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
4.	Nama : Zulkifli Hamdani, S.E Jabatan : Direktur Kepatuhan Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara umum tercantum dalam Pedoman Tat Kelola Perusahaan dan <i>Job Description</i>, antara lain : 1) Direksi wajib mengelola BPR NTB sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; 2) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR NTB terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK antara lain komitmen dalam action plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data dan terhadap hasil Pengawasan OJK yang terkait dengan penerapan Program APU PPT dan PPPSPM; 3) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR NTB telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; 4) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 5) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 6) Mencegah Direksi agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 7) Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai; 8) Melaporkan kepada Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi; 9) Memastikan seluruh organ BPR NTB telah bekerja sesuai ketentuan dan mematuhi prosedur yang berlaku; 10) Memastikan kebenaran laporan keuangan BPR NTB yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan, laporan publikasi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	dan laporan lainnya yang wajib disampaikan ke OJK; 11) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi perbaikan dari auditor intern, hasil pengawasan Komisaris, OJK, dan/atau auditor ekstern lainnya sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan 12) Mencegah Direksi untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain.
	Tindak Lanjut Rekomendasi/Penasihatan Dewan Komisaris, termasuk yang belum ditindaklanjuti : 1. Sudah Ditindaklanjuti : a. Bank telah berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan meningkatkan kualitas aspek analisa kredit melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Analisa Kredit secara terintegrasi; b. Bank telah berupaya memperbaiki sistem penilaian kredit dan pengawasan debitur melalui pengembangan aplikasi SIAK dan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring; c. Bank Telah melakukan review dan penyusunan draft perubahan Prosedur Hapus Buku Kredit Macet sesuai peraturan yang berlaku, disamping itu bank telah melakukan simulasi perhitungan NPL pasca proses Hapus Buku; d. Bank telah melakukan kerjasama dengan konsultan hukum yang bersifat independen dan objektif untuk meningkatkan efisiensi serta kepatuhan regulasi; e. Bank telah melakukan perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat; dan f. Bank telah berupaya memperkuat fungsi, tugas dan tanggung jawab SKAI di tahun 2025. 2. Belum ditindaklanjuti : a. Peningkatan Performance gedung kantor telah diupayakan pada beberapa Kantor Cabang berupa pemasangan fasilitas papan nama kantor cabang yang baru, sedangkan untuk renovasi gedung kantor cabang akan dilakukan secara bertahap. Sementara untuk renovasi kantor pusat belum dapat dilakukan dikarenakan kepemilikan gedung masih dalam status sewa; b. Penyempurnaan riset pasat belum dapat dilakukan di tahun 2024 dan akan

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
	dilakukan pada tahun 2025; c. Bank masih dalam proses persiapan Penerapan Key Performance Indikator (KPI), Bank telah melakukan kegiatan pelatihan dan persiapan data awal kepegawaian melalui Aplikasi KPI; d. Bank telah berupaya melakukan review dan menyusun draft perubahan struktur organisasi, selanjutnya akan diterbitkan di tahun 2025; dan e. Bank telah berupaya melakukan persiapan konversi syariah dengan membentuk tim Konversi syariah, untuk tahapan konversi syariah selanjutnya akan dilakukan di tahun 2025.

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si Jabatan : Komisaris Utama Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR NTB PERSERODA, bertanggung jawab memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pengawasan terhadap Direksi, serta memberikan nasihat strategis untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Komisaris Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan perusahaan tanpa terlibat langsung dalam keputusan operasional, kecuali terkait penyediaan dana dalam batas BMPK atau hal yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, Komisaris Utama memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit, serta melaporkan pelanggaran regulasi atau kondisi yang berpotensi mengganggu operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 10 hari kerja. Untuk memperkuat pengawasan, Komisaris Utama mengawasi pembentukan dan kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam aspek manajemen risiko, Komisaris Utama berperan dalam mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan APU dan PPT, mengawal implementasi Rencana Bisnis Bank, serta memantau kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat dengan OJK, termasuk action plan kredit dan pengkinian data. Komisaris Utama juga mendorong profesionalisme, kompetensi, serta integritas anggota Komisaris, menjaga hubungan harmonis dalam organisasi, serta memastikan kesesuaian operasional bank dengan regulasi. Untuk menunjang efektivitas pengawasan, Komisaris Utama

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	menerapkan pedoman kerja yang mencakup etika, waktu kerja, dan aturan rapat, serta wajib menyediakan waktu yang cukup untuk tugasnya. Dalam penyusunan laporan pengawasan Rencana Bisnis, Komisaris Utama memberikan pendapat, menyampaikan langkah pengawasan, serta menandatangani laporan tersebut sebelum disampaikan ke OJK. Untuk memastikan koordinasi yang baik dengan Direksi, Komisaris Utama mengadakan rapat berkala, memastikan strategi perusahaan berjalan optimal guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha PT BPR NTB PERSERODA
2.	Nama : Syarif Mustaan, S.E
	Jabatan : Komisaris Independen
	Syarif Mustaan, S.E. menjabat sebagai Komisaris Independen PT BPR NTB PERSERODA bertanggung jawab melaksanakan tugas secara independen dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tingkatan organisasi. Dalam pengawasan terhadap Direksi, Komisaris Independen mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan tanpa terlibat langsung dalam keputusan operasional, kecuali terkait penyediaan dana sesuai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan peraturan perundang-undangan. Komisaris Independen memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit, memantau kepatuhan terhadap regulasi, serta melaporkan pelanggaran keuangan atau potensi risiko usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 10 hari kerja. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Komisaris Independen membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi guna memastikan kebijakan berjalan optimal. Pedoman kerja Komisaris Independen mencakup etika kerja, waktu kerja, dan aturan rapat, serta memastikan pelaksanaan tugas secara efektif. Dalam penyusunan laporan pelaksanaan dan pengawasan Rencana Bisnis Bank, Komisaris Independen memberikan pendapat, menyampaikan langkah pengawasan, serta menandatangani laporan tersebut sebelum disampaikan kepada OJK. Selain itu, Komisaris Independen mengawasi kesesuaian operasional perusahaan dengan regulasi, mendorong profesionalisme anggota, serta menjaga hubungan harmonis dalam lingkungan kerja. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Komisaris Independen melaksanakan rapat berkala dengan Direksi, memastikan strategi perusahaan berjalan sesuai visi dan misi perusahaan serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha PT BPR NTB PERSERODA.

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
3.	Nama : Ria Prayuniarti, S.P Jabatan : Komisaris Independen Ria Prayuniarti, S.P. menjabat sebagai Komisaris Independen PT BPR NTB PERSERODA bertanggung jawab melaksanakan tugas secara independen dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di seluruh tingkatan organisasi. Dalam pengawasan terhadap Direksi, Komisaris Independen mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan tanpa terlibat langsung dalam keputusan operasional, kecuali terkait penyediaan dana sesuai batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan peraturan perundang-undangan. Komisaris Independen memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit, memantau kepatuhan terhadap regulasi, serta melaporkan pelanggaran keuangan atau potensi risiko usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 10 hari kerja. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Komisaris Independen membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, serta dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi guna memastikan kebijakan berjalan optimal. Pedoman kerja Komisaris Independen mencakup etika kerja, waktu kerja, dan aturan rapat, serta memastikan pelaksanaan tugas secara efektif. Dalam penyusunan laporan pelaksanaan dan pengawasan Rencana Bisnis Bank, Komisaris Independen memberikan pendapat, menyampaikan langkah pengawasan, serta menandatangani laporan tersebut sebelum disampaikan kepada OJK. Selain itu, Komisaris Independen mengawasi kesesuaian operasional perusahaan dengan regulasi, mendorong profesionalisme anggota, serta menjaga hubungan harmonis dalam lingkungan kerja. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Komisaris Independen melaksanakan rapat berkala dengan Direksi, memastikan strategi perusahaan berjalan sesuai visi dan misi perusahaan serta mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha PT BPR NTB PERSERODA.
4.	Nama : Drs. Moh. Abduh, MM
	Jabatan : Komisaris
	Drs. Moh. Abduh, MM. Menjabat sebagai Anggota Komisaris PT BPR NTB PERSERODA bertanggung jawab memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan pengawasan terhadap Direksi, serta memberikan nasihat strategis untuk mendukung keberlanjutan bisnis. Anggota Komisaris mengarahkan, memantau

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	dan mengevaluasi kebijakan perusahaan tanpa terlibat langsung dalam keputusan operasional, kecuali terkait penyediaan dana dalam batas BMPK atau hal yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, Anggota Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit, serta melaporkan pelanggaran regulasi atau kondisi yang berpotensi mengganggu operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 10 hari kerja. Untuk memperkuat pengawasan, Anggota Komisaris mengawasi pembentukan dan kinerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam aspek manajemen risiko, Anggota Komisaris berperan dalam mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan APU dan PPT, mengawal implementasi Rencana Bisnis Bank, serta memantau kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat dengan OJK, termasuk action plan kredit dan pengkinian data. Anggota Komisaris juga mendorong profesionalisme, kompetensi, serta integritas anggota Komisaris, menjaga hubungan harmonis dalam organisasi, serta memastikan kesesuaian operasional bank dengan regulasi. Untuk menunjang efektivitas pengawasan, Anggota Komisaris menerapkan pedoman kerja yang mencakup etika, waktu kerja, dan aturan rapat, serta wajib menyediakan waktu yang cukup untuk tugasnya. Dalam penyusunan laporan pengawasan Rencana Bisnis, Anggota Komisaris memberikan pendapat, menyampaikan langkah pengawasan, serta menandatangani laporan tersebut sebelum disampaikan ke OJK. Untuk memastikan koordinasi yang baik dengan Direksi, Anggota Komisaris mengadakan rapat berkala, memastikan strategi perusahaan berjalan optimal guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha PT BPR NTB PERSERODA.
	Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi : 1. Perbaikan gedung kantor membutuhkan biaya besar, sehingga harus dilakukan bertahap sesuai prioritas dan kondisi keuangan BPR. Direksi perlu mengelola anggaran secara optimal agar tidak mengganggu operasional; 2. Direksi perlu melakukan riset pasar agar produk simpanan kompetitif. Strategi pemasaran harus efektif dan kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta regulasi yang berlaku; 3. KPI harus relevan dengan strategi bisnis dan mencerminkan kinerja individu serta BPR secara keseluruhan; 4. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas bisnis Bank terutama dalam

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
	penyaluran kredit dengan meningkatkan kualitas aspek analisa proses pencairan kredit; 5. Direksi perlu memperbaiki sistem penilaian kredit dan pengawasan debitur untuk menekan risiko kredit bermasalah sesuai regulasi OJK; 6. Dewan Komisaris memberikan penasihatan untuk melakukan <i>review</i> kembali terhadap prosedur hapus buku agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan pertimbangan untuk melakukan <i>stress test</i> apabila ingin melakukan hapus buku, sehingga dapat menggambarkan kondisi sebenarnya terkait kualitas kredit pasca penghapusbukuan kredit macet tersebut; 7. Kerja sama dengan konsultan harus bersifat independen dan objektif untuk meningkatkan efisiensi serta kepatuhan regulasi; 8. Perubahan struktur organisasi harus mendukung pengawasan, pengendalian, dan peningkatan kompetensi SDM. Sosialisasi perlu dilakukan agar transisi berjalan lancar tanpa mengganggu operasional; 9. Konversi syariah memerlukan persiapan matang, termasuk perubahan sistem, pelatihan SDM, dan kepatuhan regulasi. <i>Roadmap</i> dan studi kelayakan harus disusun untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi BPR dan nasabah; 10. BPR telah mengubah nama menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" sesuai strategi dalam RBB 2024; dan 11. Fungsi, tugas, dan tanggung jawab SKAI harus diperkuat agar lebih efektif dalam pengawasan dan pengendalian internal..

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit; 2. Dalam rangka melaksanakan tugas, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; c. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, Akuntan Publik dan hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain; dan d. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit. 3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
	Program Kerja : 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit; 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terhadap : a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit; c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; dan d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil Pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan otoritas lain. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Realisasi : Semua Program Telah Terlaksana Jumlah Rapat : 4 kali
2.	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; dan 2. Dalam rangka memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko paling sedikit

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	melakukan : - Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Program Kerja : - Membantu melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi yang mencakup : - Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; - Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; - Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan, strategik, dan reputasi; dan - Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite pemantau risiko serta satuan kerja manajemen risiko untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko; - Mengevaluasi laporan profil risiko BPR dengan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi BPR serta usulan langkah-langkah untuk melakukan mitigasi atas risiko tersebut, sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah-langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan; - Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Kepatuhan BPR sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh Perjanjian dan Komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak-pihak terkait lainnya; dan - Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi risiko dan kepatuhan. Realisasi : Semua Program Telah Terlaksana Jumlah Rapat : 3 kali
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : Komite Remunerasi dan Nominasi wajib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara independen;

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	2. Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit mencakup : a. Evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan b. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi. 3. Dalam rangka melakukan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. Prestasi kerja individual; c. Kewajaran dengan peer group; dan d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR NTB. Program Kerja : A. Bidang Remunerasi meliputi : 1. Memberikan rekomendasi jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Mengusulkan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi : a. Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk Direksi; b. Anggota Komite Dewan Komisaris; dan c. Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Menilai kesesuaian remunerasi dengan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 4. Merekomendasikan kompensasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Dewan Komisaris secara berkala; 5. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan kehati-hatian, kinerja bank, risiko, perbandingan industri, strategi jangka panjang, dan regulasi; 6. Memastikan kesesuaian kebijakan dan pelaksanaan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan pegawai; 7. Meninjau kebijakan remunerasi minimal setahun sekali; dan 8. Menyusun struktur remunerasi yang mencakup gaji, honorarium, tunjangan, dan insentif, dengan pengecualian insentif bagi Dewan Komisaris untuk menghindari benturan kepentingan. B. Bidang Nominasi meliputi : 1. Merekomendasikan sistem dan prosedur pemilihan serta penggantian Dewan Komisaris dan Direksi;

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	2. Mengajukan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak independen untuk Komite Dewan Komisaris; 3. Menyusun rekomendasi terkait : a. Komposisi jabatan di Dewan Komisaris dan Direksi; b. Kriteria nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja; dan c. Proses pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Dewan Komisaris serta Direksi untuk disampaikan ke RUPS. 4. Membantu Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan; 5. Merekomendasikan program pengembangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Memantau serta mengevaluasi pencapaian strategi jangka panjang BPR. Realisasi : Semua Program Telah Terlaksana Jumlah Rapat : 2 kali
4.	Komite Manajemen Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Menyusun kebijakan dan pedoman Manajemen Risiko, termasuk rekomendasi mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko dalam menentukan strategi bisnis BPR; 2. Melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan 3. Memberikan pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal operasional Bank. Program Kerja : 1. Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; 2. Perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; 3. Pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal. Realisasi : 1. Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance 2. Penetapan Parameter dan penetapan limit per Jenis Risiko; 3. Membuat RAC kredit Pertanian dan Perkebunan; 4. Mereview dan revisi kebijakan limit;

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
	5. Membahas jangka waktu kredit pertanian jagung; 6. Membahas tentang indikasi fraud.
	Jumlah Rapat : 4 kali
	Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite : Program kerja masing-masing komite telah ditindaklanjuti dan semua program telah terlaksana.

*) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan realisasi program kerja.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1.	Ria Prayuniarti, SP	Keuangan	Ketua	Ketua	Anggota	Tidak Menjabat	-	Tidak
2.	Syarif Musta'an, SE	Keuangan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak Menjabat	-	Tidak
3.	Zulkifli Hamdani, SE	Kepatuhan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	-	Tidak
4.	Hj. Denda Sucihartiani, SE	Bisnis	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	-	Tidak
5.	H. Usman, SH.MH	Operasional	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	-	Tidak
6.	Islan Hulaoli, SE	Manajemen Risiko	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Sekretaris	-	Tidak
7.	Yusuf Sa'ban, SE	Kepatuhan	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	-	Tidak
8.	Ami Brimapon, S.Kom	Bisnis	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	-	Tidak
9.	Moh. Zuhrol Fata, SE.I	Operasional	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Anggota	-	Tidak
10.	H. Lalu Didi Januardi, SE	Operasional	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	-	Tidak
11.	M. Raihan Mubaraq, SE. MA	Keuangan	Anggota	Anggota	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	-	Ya

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pada BPR NTB

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Ketut Sudharmana, S.P	0	0	0	0
2.	H. Usman, S.H., M.H	0	0	0	0
3.	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	0	0	0	0
4.	Zulkifli Hamdani, S.E	0	0	0	0

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si	0	0	0	0
2.	Ria Prayuniarti, SP	0	0	0	0
3.	Syarif Mustaan, S.E	0	0	0	0
4.	Drs. Moh. Abduh, MM	0	0	0	0

Keterangan : Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR NTB

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR NTB

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
Direksi				
1.	Ketut Sudharmana, S.P	-	0	0
2.	H. Usman, S.H., M.H	-	0	0
3.	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	-	0	0
4.	Zulkifli Hamdani, S.E	-	0	0
Komisaris				
1.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si	-	0	0
2.	Ria Prayuniarti, SP	-	0	0
3.	Syarif Mustaan, S.E	-	0	0
4.	Drs. Moh. Abduh, MM	-	0	0
Pemegang Saham				
1.	Pemerintah Daerah Provinsi NTB	-	0	0
2.	Pemerintah Kota Mataram	-	0	0
3.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	PT BPR PESISIR LAYAR BERKEMBANG	64.71%	64.71%
4.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	-	0	0
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	-	0	0
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	-	0	0
7.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	-	0	0
8.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	-	0	0
9.	Pemerintah Kabupaten Dompu	-	0	0
10.	Pemerintah Kabupaten Bima	PT BPR PESISIR AKBAR	95.30%	95.05%
11.	Pemerintah Kota Bima	-	0	0
Keterangan : Terdapat Pemegang saham yang memiliki kepemilikan saham pada Kelompok Usaha BPR, antara lain : 03 - Pemda Kabupaten Lombok Barat pada PT BPR PESISIR LAYAR BERKEMBANG; dan 10 - Pemda Kabupaten Bima pada PT BPR PESISIR AKBAR.				

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

1) Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Ketut Sudharmana, S.P	-	-	-
2.	H. Usman, S.H., M.H	-	-	-
3.	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	-	-	-
4.	Zulkifli Hamdani, S.E	-	-	-

2) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Prosentase Kepemilikan (%)
1.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si	-	-	-
2.	Ria Prayuniarti, SP	-	-	-
3.	Syarif Mustaan, S.E	-	-	-
4.	Drs. Moh. Abduh, MM	-	-	-

Keterangan : Keterangan : Direksi dan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pada BPR

1) Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ketut Sudharmana, S.P	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	H. Usman, S.H., M.H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Zulkifli Hamdani, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2) Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ria Prayuniarti, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Syarif Mustaan, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Drs. Moh. Abduh, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3) Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR NTB

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Pemerintah Daerah Provinsi NTB	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pemerintah Kota Mataram	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	Pemerintah Kabupaten Dompu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10.	Pemerintah Kabupaten Bima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	Pemerintah Kota Bima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat hubungan keuangan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pada BPR NTB. Adapun Daftar Pemegang Saham BPR NTB adalah Sebagai berikut :

- 01 - Pemerintah Daerah Provinsi NTB;
- 02 - Pemerintah Kota Mataram;
- 03 - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 04 - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- 05 - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- 06 - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- 07 - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 08 - Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 09 - Pemerintah Kabupaten Dompu;
- 10 - Pemerintah Kabupaten Bima; dan
- 11 - Pemerintah Kota Bima.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pada BPR NTB

1) Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Ketut Sudharmana, S.P	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	H. Usman, S.H., M.H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Hj. Denda Sucihartiani, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Zulkifli Hamdani, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2) Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR NTB

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ria Prayuniarti, SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Syarif Mustaan, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Drs. Moh. Abduh, MM	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

3) Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR NTB

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Pemerintah Daerah Provinsi NTB	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Pemerintah Kota Mataram	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
7.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
9.	Pemerintah Kabupaten Dompu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
10.	Pemerintah Kabupaten Bima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
11.	Pemerintah Kota Bima	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Tidak terdapat hubungan keluarga sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pada BPR NTB. Adapun Daftar Pemegang Saham BPR NTB adalah Sebagai berikut :

- 01 - Pemerintah Daerah Provinsi NTB;
- 02 - Pemerintah Kota Mataram;
- 03 - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- 04 - Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- 05 - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- 06 - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- 07 - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
- 08 - Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- 09 - Pemerintah Kabupaten Dompu;
- 10 - Pemerintah Kabupaten Bima; dan
- 11 - Pemerintah Kota Bima..

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	4	494.424.600	4	583.072.017
2.	Tunjangan	4	1.258.165.200	0	0
3.	Tantiem	4	883.894.574	3	270.466.892
4.	Kompensasi Berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi lainnya**)	4	81.600.000	0	0
Total Remunerasi			2.718.084.374		853.538.909
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan	0	0	0	
2.	Transportasi	4	1.516.705.393	1	386.300.000
3.	Asuransi Kesehatan	4	17.280.000	3	17.280.000
4.	Fasilitas Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			1.533.985.393		403.580.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			4.252.069.767		1.257.118.909

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang diterima di tahun 2024, antara lain:

- 1). Jumlah gaji adalah merupakan jumlah gaji pokok untuk Direksi dan jumlah honor yang diterima oleh Dewan Komisaris.
- 2). Jumlah Tunjangan adalah merupakan Tunjangan Istri/Suami dan Anak, tunjangan Jabatan dan Tunjangan Kinerja untuk Direksi.
- 3). Jumlah Tantiem adalah merupakan jumlah tantiem yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023 yang dibagi tahun 2024; dan
- 3). Jumlah Remunerasi Lainnya adalah merupakan Tunjangan Perumahan Direksi untuk tahun buku 2024.

Paket/Kebijakan Fasilitas Lain yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2024, antara lain :

- 1) Komisaris Utama dan masing-masing Direksi menggunakan fasilitas 1 (satu) unit Mobil Dinas, adapun nilai yang disajikan adalah harga perolehan kendaraan dinas yang digunakan Direksi dan Komisaris; dan
- 2) Semua Dewan Komisaris dan semua Direksi mendapat fasilitas kesehatan dengan ikut dalam program BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung perusahaan;

12. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan**)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang Terendah (b)	9,52 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,28 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan Gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,62 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai Yang tertinggi (b)	3,25 : 1

***) Rasio gaji tertinggi dan terendah secara keseluruhan yang diterima secara tunai oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

13. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	15 Januari 2024	3	) Pembahasan SOP SKAI dan APU, PPT & PPPSPM.) Kelengkapan Data Laporan Tata Kelola Perusahaan
2.	19 Januari 2024	3	Rencana Hapus Buku PT BPR NTB PERSERODA
3.	25 Januari 2024	3	) Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Bank.) Persoalan Asuransi CAR
4.	5 Februari 2024	3	) Remunerasi Pengurus 2024) Tindaklanjut hasil temuan SKAI PT BPR NTB

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
			PERSERODA.) Penerapan SAK-EP dan CKPN
5.	14 Maret 2024	3	) Rencana Bisnis Bank Penyesuaian tahun 2024.) Rencana Study Tiru BPR Syariah
6.	3 April 2024	3	Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Plampang
7.	3 Juni 2024	3	) Dampak terbitnya SK Promosi dan Mutasi.) Tindaklanjut hasil RUPS tahun buku 2023
8.	1 Juli 2024	3	) Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Kopang) Perpajakan Kontrak Anggota Komite) Penunjukan KAP/AP untuk audit umum tahun buku 2023.) Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Praya Timur
9.	8 Juli 2024	3	Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Batukliang.
10.	22 Juli 2024	3	) Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Dompu.) Evaluasi Kinerja bulan Juni 2023 (Semeter 1)
11.	2 September 2024	3	) Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Dompu) Struktur Organisasi PT BPR NTB PERSERODA) Perubahan nomenklatur Bank.) Efektivitas Tim Pembinaan Kantor Cabang PT BPR NTB PERSERODA
12.	22 Oktober 2024	4	Rencana Penghapusbukuan Kredit Macet PT BPR NTB PERSERODA
13.	12 November 2024	4	) Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Sumbawa.) Penetapan KAP tahun buku 2024 dalam RUPS
14.	28 November 2024	4	Telaah Draft RBB tahun buku 2025
15.	11 Desember 2024	4	) Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Janapria.) Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus KC. Praya Barat.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 15 kali rapat internal bersama Anggota Dewan Komisaris lainnya.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam%)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Lalu Nofian Hadi Saputra, S.Si	15	0	100,00%
2.	Ria Prayuniarti, SP	15	0	100,00%
3.	Syarif Mustaan, S.E	15	0	100,00%
4.	Drs. Moh. Abduh, MM	4	0	26,67%

**) Rapat hanya dilakukan dengan kehadiran fisik dengan tingkat kehadiran masing-masing Anggota Dewan Komisaris 100%. Kecuali Drs.Moh Abduh, MM yang baru menjabat sejak Oktober 2024.

15. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	6	10	-	1
Telah Diselesaikan		-		-		4		1
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	2	6	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Tidak terdapat penyimpangan / kecurangan Internal Bank oleh Dewan Komisaris dan Direksi namun terdapat penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pada tahun 2024.

16. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai Kekuatan hukum yang tetap)	0	2
Dalam Proses Penyelesaian	0	2
Total	0	4

Keterangan :

- a. Kasus Pidana (Tipibank) yang sudah selesai yang telah mempunyai hukum tetap :
 - 1) Dompu 1 kasus; dan
 - 2) Bima 1 kasus.
- b. Kasus Pidana yang masih dalam proses penyelesaian :
 - 1) Kota Mataram 1 kasus; dan
 - 2) Bima 1 Kasus.

17. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Nurhayati	Pemimpin Cabang	Nurhayati	Pemimpin Cabang	Penggunaan Agunan Kredit	400	Pemberian kredit atas nama Sudarmiyanto menggunakan agunan atas nama suami dari Nurhayati (Pemimpin Cabang). Pada posisi 31 Desember 2024 kualitas kredit telah menjadi Macet.

18. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	02/01/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana renovasi Pura Sakti Manuaba Lingkungan Sindu Seksari Cakranegara Utara	KETUT DATUR	10.000.000,00
2.	08/01/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana dukungan kegiatan pelaksanaan DIES NATALIS Ke-57 Fakultas Pertanian UNRAM	DWI PRAPTOMO SUDJATMIKO	10.000.000,00
3.	19/01/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana kegiatan Pita Putih Indonesia (PPI) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024	SRI MULIANA WIDIASTUTI	5.000.000,00
4.	26/01/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan semen pembangunan Masjid AT-TAUBAH Dusun Brembeng Barat Desa Sigerongan Kec.Lingsar Kab.Lombok Barat	FAEZAL ANWAR	1.750.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
5.	01/02/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan semen pembangunan TPQ ZAINIYATUNNUR Dusun Mapak Reong Desa Kuranji Dalang Kec.Labuapi Kab.Lobar	NURFAJRIAH	1.750.000,00
6.	01/02/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan semen pembangunan TPQ ZAINIYATUNNUR Desa Merembu Kec.Labuapi Kab.Lobar	MIRWAN BATUBARA	1.750.000,00
7.	01/02/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan 6 buah matras untuk Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Lombok Barat	H SURATMAN	3.900.000,00
8.	02/02/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan semen pembangunan PAUD CEMPAKA BATU RIMPANG Desa Badrain Kec.Narmada Kab.Lombok Barat	ABDULLAH	1.750.000,00
9.	07/02/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan kursi plastik untuk keperluan Musholla AL-BAROKAH Perumahan Mapak Indah Kec.Sekarbela Kota Mataram	M. GASIH	5.000.000,00
10.	12/02/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan semen untuk TPQ AL-AMIN Dusun Buyun Mas Kecamatan Sekotong - Lombok Barat	ZULMAN	1.750.000,00
11.	12/02/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan semen untuk Yayasan NURUL HUDA Desa Kedaro Kecamatan Sekotong - Lombok Barat	SADLI	1.750.000,00
12.	16/02/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (PPI) 2024 Persatuan Wartawan Indonesia Cabang NTB	RACHMAN HAKIM	10.000.000,00
13.	01/03/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Gerakan Menanam Satu Juta Pohon Kelapa Kuartir Daerah Gerakan Pramuka NTB	JAKA AGUSTA PRATAMA	10.000.000,00
14.	25/03/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan santunan Anak Yatim dan 100 PCS sarung dalam rangka Silaturahmi dan Safari Ramadhan PEMPROV NTB	Masyarakat Umum (anak yatim)	28.250.000,00
15.	27/03/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Program Berbagi Berkah Ramadhan 1445H/2024 Forum Wartawan Ekonomi Dan Bisnis NTB	FORUM WARTAWAN EKONOMI DAN BISNIS	5.000.000,00
16.	28/03/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Penyediaan 3 Unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya Pemkab Dompu	SOEKARNO	24.000.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
17.	28/03/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR santunan kepada Anak Yatim dan Fakir Miskin Asuhan Tpq Fauzul Jannah Ampenan	H. FATHURAHMAN	10.000.000,00
18.	28/03/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Doa Bersama dan Pemberian Santunan Lombok Global Institute (LOGIS)	M. FIHIRUDIN	2.500.000,00
19.	03/04/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Santunan Kepada Anak Yatim Piatu Melalui Ikatan Remaja Masjid NURUL FALAH, Bodak Kab.Lombok Tengah	M, ABDUH AL WANI	7.500.000,00
20.	03/04/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Santunan Kegiatan Bulan Peduli Sosial Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Prov.NTB Tahun 2024	SITI MUR WATI	7.500.000,00
21.	05/04/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Santunan Melalui Kegiatan Ramadhan Bersama HIMMAH NW Kota Mataram	SAEFULLAH ANSHORI	5.000.000,00
22.	05/04/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan Ramadhan Pengutrus Wilayah Ikatan Da'i Indonesia 1445 NTB	L WIRA ILHAM	5.000.000,00
23.	05/04/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan Santunan Ramadhan Peduli 2024	Masyarakat Umum	2.500.000,00
24.	17/04/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Safari Ramadhan Kab.Lombok Utara	Masyarakat Umum	10.000.000,00
25.	25/04/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) KE-XXX Kabupaten Dompu	H. SIRAJUDDIN	5.000.000,00
26.	26/04/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan Tabligh Akbar Halal Bihalal Seperempat Abad Pondok Pesantren AL-MUJAHIDIN	Pondok Pesantren AL-MUJAHIDIN	5.000.000,00
27.	22/05/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan Sangkep Karya Masyarakat Adat Sasak (MAS) 2024	KHAIRIL ANWAR	10.000.000,00
28.	10/06/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan Fossbi Ke-8 dan Safin CUP 2024	Masyarakat Umum	10.000.000,00
29.	19/06/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Pembelian Hewan Kurban Pada CV. MUDA BAKTI BAROKAH	CV. MUDA BAKTI BAROKAH	188.500.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
30.	28/06/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Pembangunan Masjid NURUL FALAH Dusun Lekong Dendek Desa Dasan Tereng Kec.Narmada Kab.Lombok Barat	H JUMAEDI	7.000.000,00
31.	01/07/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Pembangunan Masjid NURUL IMAN Dasan Lekong Desa Bujak Kab.Lombok Tengah	M. MURSAL	5.000.000,00
32.	24/07/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Pembangunan Ruang Kelas Baru Pondok Pesantren NW YAYASAN NW Sepit Kab. Lombok Timur	SYAIPUL JIHAT	7.500.000,00
33.	25/07/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) KIRAB AGUNG PUSAKA KEDATUAN LANGKO DAN BENUA 2024	LALU SASTRA BUDIARTA	10.000.000,00
34.	01/08/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) PEMBANGUNAN MASJID JABAL NUR LINGKUNGAN DOROTO'I KEL.DOROTANGGA KEC.DOMPU KAB.DOMPU	MASJID JABAL NUR	5.000.000,00
35.	05/08/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS MASJID KOTA MATARAM (MES)	MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH	100.000.000,00
36.	15/08/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Aula YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUHSININ LABULIA Kab. Lombok Barat	PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUHSININ LABULIA	7.500.000,00
37.	15/08/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan KKN - PPM UNIVERSITAS GAJAH MADA Periode 2 Tahun 2024 Lembaran Bayan KLU	AZQIA MURSYIDAH	5.000.000,00
38.	22/08/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Dialog Publik Eksekutif Wilayah Perempuan Suluh NTB	Masyarakat Umum	5.000.000,00
39.	30/08/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Dusun Bilasundung Desa Paokmotong Kec.Masbigk Kab.Lombok Timur	Masyarakat Umum	5.000.000,00
40.	02/09/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Atlit Pelatda PON XXI Cabor Tenis Meja Prov.NTB	Masyarakat Umum	10.000.000,00
41.	04/09/2024	01	Bantuan 75 Buah Matras Sebagai Bantuan Fasilitas	SRI BUKYA	36.375.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
		(Kegiatan Sosial)	Asrama UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA		
42.	05/09/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Pengadaan Podium Masjid NURUL HIDAYAH Sesela Kec.Gunung Sari Kab.Lombok Barat	LUKMANUL HAKIM	3.000.000,00
43.	10/09/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Aksi Penurunan Stunting Kab.Sumbawa	YULIA LAELA	10.000.000,00
44.	20/09/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan Pengabdian Sopoq Ate Bersih Lingkungan (SOPAA BERLIAN) Oleh Gerakan Kwartir Pramuka Prov.Ntb	JAKA AGUSTA PRATAMA	5.000.000,00
45.	23/09/2024	01 (Kegiatan Sosial)	BANTUAN SEMEN UNTUK PEMBANGUNAN MASJID NURUL HUDA DESA GONTAR KECAMATAN ALAS BARAT	SYAMSUDDIN	4.080.000,00
46.	25/09/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) KEGIATAN SEMINAR TATA RIAS PENGANTIN SASAK INOVASI DAN PENGANTIN SUMBAWA PENGKENANG PENGANTAN TOPE BELA BUNGAK	RETNO PUJIHASTUTI	5.000.000,00
47.	27/09/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR MAULID NABI MUHAMMAD SAW MASJID NURUL JANAH BATU RAJA KECAMATAN AMPENAN UTARA	HABIBUL ARDI	2.000.000,00
48.	04/10/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR KEGIATAN FESTIVAL QASIDAH PELAJAR TAHUN 2024 DPD LASQI KOTA MATARAM	YEFI PRATIWI	3.000.000,00
49.	07/10/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR PEMBANGUNAN YAYASAN MASJID NURUL YAQIN DUSUN RUNTAK DESA MONTONG TEREK KECAMATAN PRAYA	NAJAMUDIN	25.000.000,00
50.	10/10/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan GERAKAN PRAMUKA MENANAM Oleh Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Nusa Tenggara Barat	JAKA AGUSTA PRATAMA	10.000.000,00
51.	14/10/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan KHUTBATUL ARSY PONPES JABAL HIKMAH	SAEFULLAH ANSHORI	5.000.000,00
52.	14/10/2024	01	Bantuan Dana CSR Kegiatan	Masyarakat Umum (anak	5.000.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
		(Kegiatan Sosial)	Santunan Anak Yatim Dalam Rangka HUT LOGIS KE-16	yatim)	
53.	22/10/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Penyaluran Dana CSR Bantuan Air Bersih Di Kabupaten Sumbawa	Masyarakat Umum	8.000.000,00
54.	24/10/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana (CSR) Kegiatan Senam Bersama Dalam Rangka Bulan Kesadaran Kanker Payudara	YEFI PRATAMI	5.000.000,00
55.	29/10/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Permohonan Dana Kegiatan Untuk Perwakilan NTB Dalam Pemilihan Puteri Anak Dan Remaja Indonesia 2024 dan Pemilihan Puteri Batik Anak Dan Remaja Cilik Indonesia	BUNIAMIN FARAHAT ST	5.000.000,00
56.	29/10/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan Bakti Sosial Jaringan Pemuda Dan Mahasiswa NTB Tahun 2024	SAIDIN	2.500.000,00
57.	04/11/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Penyaluran Dana CSR Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba Dan Berbagi Sembako	Masyarakat Umum	2.500.000,00
58.	12/11/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Program Berbagi Sembako Kepada Masyarakat NTB Ikatan Putra Putri NAHDLATUL WATHAN	M KHAERUL PATIHIN	5.000.000,00
59.	18/11/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Pembangunan Jeding MUSHOLA NURUL MUTTAQIN Dusun Batu Mas Desa Mareje Timur Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat	HASAN MASAT	10.000.000,00
60.	26/11/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Pengabdian Masyarakat Khartir Daerah Gerakan Pramuka NTB Tahun 2024	JAKA AGUSTA PRATAMA	10.000.000,00
61.	03/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan CSR Pengadaan Lemari Arsip Untuk Bantuan Sarana dan Prasarana di BAPPENDA LOBAR Anggaran Tahun 2024	BAPPENDA LOBAR	1.900.000,00
62.	06/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Tebar 1 Juta Benih Ikan Dan Kemah Kebangsaan 2024 Oleh Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis NTB	Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis NTB	15.000.000,00
63.	06/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Dana CSR Kc Bayan Bantuan 100 Sak Semen Pembangunan Masjid ALI BIN ABI THALIB	Masjid ALI BIN ABI THALIB	6.600.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
64.	06/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR PEMBANGUNAN BALE PAWEDAAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PUJAWALI PURA BANJAR KARYA DHARMA PRAWRTTI MATARAM	I NYOMAN TANTRI	5.000.000,00
65.	16/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Permohonan Dana CSR Kegiatan Pembangunan Masjid MIFTAHUL JANNAH Dusun Mertak Baru Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah Lombok Tengah	SAHIDIR	5.000.000,00
66.	16/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Masjid NURUL HAQ Dusun Kesambik, Kel. Gerunung Kec. Praya LOTENG	SUPARMAN IDRUS	5.000.000,00
67.	17/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan Pembangunan Musholla ASSYAFI'I Dusun Ngolak Desa Lajut Kecamatan Praya	MUNAWAR GAZALI	5.000.000,00
68.	17/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR MUSHALLA AS-SALIKI Kekere Timur Kel. Semayan Kec. Praya Lombok Tengah Kc Praya	KHAERUL LAILI	5.000.000,00
69.	19/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dusun Dasan Lekong Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kab Lombok Tengah	KAWAKIB	5.000.000,00
70.	24/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Satu Set Sound Profesional Yayasan AL-ISLAH DARUL FURQON NWDI Desa Lekor Kecamatan Janapria	M. JUANDI	4.750.000,00
71.	27/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Pengadaan Sound Sistem Masjid USWATUN HASANAH Desa Batu Tulis Kab Lombok Tengah	JUNAIDI	5.000.000,00
72.	27/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan Pembangunan MUSHOLLA SAMSUL HUDA Desa Mangkung Kec Praya Barat Kab Lombok Tengah	L. WIRYA ARTAPATI	5.000.000,00
73.	27/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Permohonan Dana CSR Kegiatan Pembangunan Rehab Masjid Kantor Desa Jagaraga Kuripan Lombok Barat	KANTOR DESA JAGARAGA	1.000.000,00
74.	27/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Pengadaan Kursi Inventaris Remaja Masjid AL MAKBULIN Desa Teratak	MARDAN	5.000.000,00

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
			Kab Lombok Tengah		
75.	27/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kursi Plastik Persatuan Remaja Dusun Gontoran Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kab Lombok Tengah	SAHDIN	5.000.000,00
76.	27/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Pengadaan Kursi Inventaris KELOMPOK TANI INGIN MAJU Jengguar Desa Teratak Batukliang Utara	DARMAWAN	5.000.000,00
77.	31/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana CSR Kegiatan Pembangunan MUSHALLA AL-FALAH Ds. Bunut Baik Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB	MULIADI	5.000.000,00
78.	31/12/2024	01 (Kegiatan Sosial)	Bantuan Dana Kegiatan Gerakan Pramuka Menanam Oleh Gerakan Pramuka Kwarir Daerah NTB	JAKA AGUSTA PRATAMA	5.000.000,00

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR NTB PERSEKUTUAN untuk periode 31 Desember 2024 kami susun dan laporan ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya penerapan Tata Kelola bagi PT BPR NTB PERSEKUTUAN. Kami sadari bahwa pada tahun 2024 masih banyak kekurangan serta kelemahan yang akan kami perbaiki pada tahun 2025 ini untuk dapat melaksanakan penerapan Tata Kelola secara maksimal.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 20 April 2025
 PT. BPR NTB PERSEKUTUAN

Direktur Utama


bpr ntb
 Terpercaya dan Tanggung
 DIREKSI

Ketut Sudharmana